

**IMPLEMENTASI PROGRAM SEMBAKO DI KELURAHAN
BANDAR SELAMAT MEDAN**

SKRIPSI

OLEH:

HANDY POLARISMA HASIBUAN

188520143



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 17/11/22

Access From (repository.uma.ac.id)17/11/22

**IMPLEMENTASI PROGRAM SEMBAKO DI KELURAHAN
BANDAR SELAMAT MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area*

Oleh:
HANDY POLARISMA HASIBUAN
188520143

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

ii

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 17/11/22

Access From (repository.uma.ac.id)17/11/22

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Implementasi Program Sembako di Kelurahan Bandar Selamat

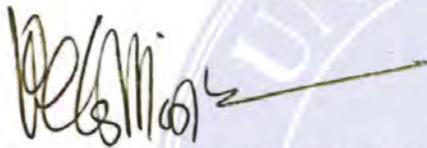
Medan

Nama : Handy Polarisma Hasibuan

NPM : 188520143

Program Studi : Administrasi Publik

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing



Beby Masitho Batubara, S.Sos. MAP

Pembimbing I



Marlina Deliana, SAB, MAB

Pembimbing II

Mengetahui



Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si

Dekan Fakultas Isipol



Khairunnisah Lubis, S.Sos, M.I.Pol

Ketua Progra Studi

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku apabila kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 27 September 2022



Handy Polarisma Hasibuan
188520143

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HANDY POLARISMA HASIBUAN
NPM :188520143
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

Dengan pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area *Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)* atas karya ilmiah saya yang berjudul: Implementasi Pelayanan Eazy Passport Di Masa Pandemi Covid 19 Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian penyampaian ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada Tanggal : 27 September 2022
Yang Menyatakan



(HANDY POLARISMA HASIBUAN)

ABSTRAK

Banyaknya masyarakat golongan ekonomi rendah sehingga pegawai kesulitan harus mendahulukan masyarakat yang lebih membutuhkan, karena keterbatasan bantuan yang hanya sedikit. Salah satu program yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat miskin adalah program sembako. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan dalam implementasi Program Sembako di Kelurahan Bandar Selamat Medan. Penelitian ini menggunakan teori implementasi dari George Edward III dengan indikator komunikasi, sumberdaya, disposisi/sikap dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Program Sembako di Kelurahan Bandar Selamat Medan belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik dikarenakan adanya beberapa hal yang menghambat implementasi program sembako seperti tidak tepatnya sasaran kepada masyarakat penerima bantuan, kurangnya kualitas SDM dalam mensosialisasikan program sembako, serta proses pendataan masyarakat penerima bantuan yang kurang. Hambatan ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang komplek menyampaikan keluhannya karena tidak mendapatkan haknya sebagai masyarakat penerima manfaat.

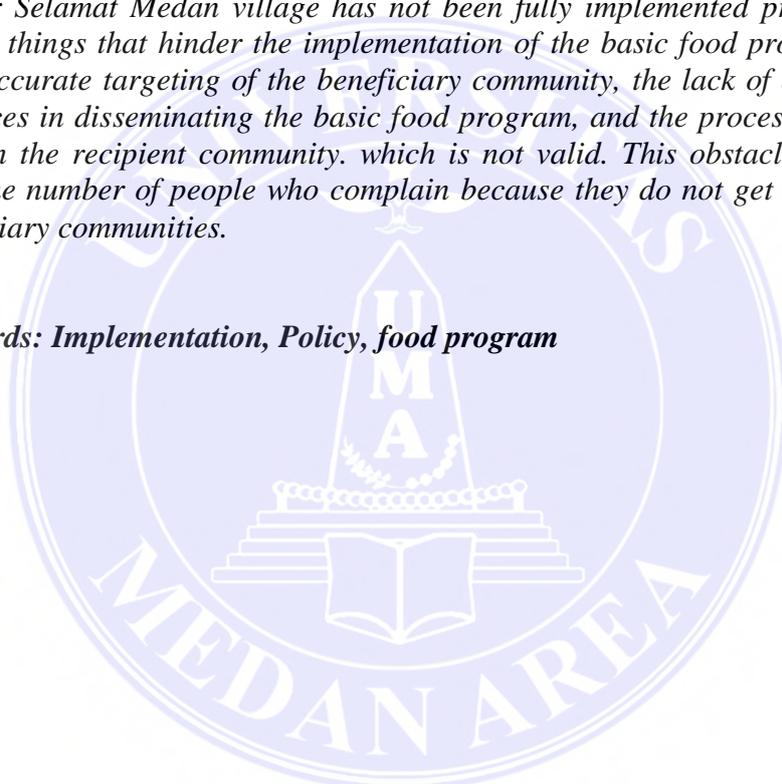
Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Program Sembako



ABSTRACT

The problem at the research site is that there are too many people from low-income groups so that it is difficult for implementers to prioritize those who need it more, because of the limited assistance that is only a little. One of the programs established by the government to reduce the burden on the poor is the basic food program. This study aims to analyze policies in the implementation of the Basic Food Program in Bandar Selamat Medan Village. This study uses the implementation theory of George Edward III with indicators of communication, resources, disposition/attitude and bureaucratic structure. The method used in this research is descriptive qualitative method. Data collection techniques used are observation, interviews and documentation and analyzed qualitatively. The results of this study indicate that the implementation of the staple food program in Bandar Selamat Medan village has not been fully implemented properly due to several things that hinder the implementation of the basic food program such as the inaccurate targeting of the beneficiary community, the lack of quality human resources in disseminating the basic food program, and the process of collecting data on the recipient community, which is not valid. This obstacle can be seen from the number of people who complain because they do not get their rights as beneficiary communities.

Keywords: *Implementation, Policy, food program*



RIWAYAT HIDUP

Penulis memiliki nama lengkap Handy Polarisma Hasibuan, anak dari Zamuddin Hasibuan dan Alesni Pasaribu lahir di Sosorgadong 1 November 1999. Penulis merupakan anak ke 6 (enam) dari 8 (delapan) bersaudara.

Penulis memulai pendidikan di SD Negeri 156315 Sosogadong pada tahun 2007 setelah itu penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Sosorgadong. Kemudian pada tahun 2016 penulis melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Sosorgadong sampai sekarang penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Medan Area.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanawata'ala. Karena atas izin dan kehendak-nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Implementasi Program Sembako di Kelurahan Bandar Selamat Medan". Skripsi ini adalah salah satu syarat kelulusan dalam mendapatkan gelar S1 jurusan Adinistrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa penulis skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis berharap kritikan dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak terhadap skripsi ini. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pihak lain pada umumnya. Dengan penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan pelajaran, dukngan motivasi, bimbingan yang sangat berharga, bantuan dari pelaksaannya hingga penyusunan laporan skripsi ini. Dengan tersusunnya skripsi ini penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada berbagai pihak terutama:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Uversitas Medan Area.
3. Ibu Khairunnisah Lubis, S.Sos, M.I.Pol selaku Kepala Program Studi Administrasi Publik

4. Ibu Beby Masitho Batubara S.Sos, MAP selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Marlina Deliana, SAB, MAB selaku dosen pembimbing II yang sudah memberikan saran dan kritik yang baik mengenai penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dra. Nurhayati Harahap, M.Ap selaku sekretaris skripsi penulis.
7. Bapak/ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area telah memberikan ilmu dan informasi dalam mengajarkan materi perkuliahan.
8. Kepada Lurah Bandar Selamat Medan serta seluruh pegawai kelurahan yang telah bersedia memberikan saya kesempatan melakukan penelitian dan mendapatkan data-data
9. Kepada Kelurahan Bandar Selamat yang telah bersedia menjadi informan tambahan ibu Sri dan ibu Hanum
10. Terkhusus kepada kedua orang tua yang saya cintai yang telah mendidik dan memberikan kasih sayangnya serta dukungan doa dan materi yang tiada cukupnya diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Untuk teman seperjuangan yang telah banyak membantu saya dalam Menyusun skripsi ini Lesro Sihombing, Rahma Nur Nazia, Kholidah Tanjung, Clarita Sianipar, Triska Aprilia.
12. Kepada semua saudara laki-laki saya Amaluddin Hasibuan, Maraiman Hasibuan, Mino Putramin Hasibuan, Hairul Saleh Hasibuan, yang selalu membantu dan mensupport dalam proses penyusunan skripsi ini.

13. Seluruh teman-teman dari Administrasi Publik Angkatan 2018.

Dalam Penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan, maka dari itu dengan segala kerendahan hati penulis memohon maaf sebesar-besarnya dan kepada Allah penulis memohon ampun.

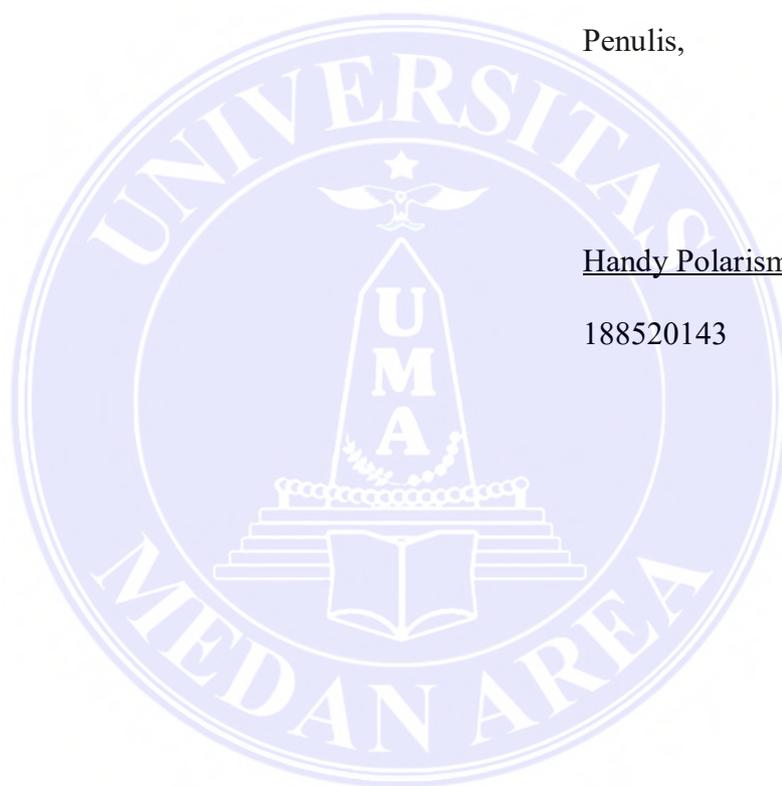
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, 27 September 2022

Penulis,

Handy Polarisma Hasibuan

188520143



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Pengertian Implementasi.....	6
2.2 Pengertian Kebijakan Publik.....	12
2.3 Aspek-aspek yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan Publik	13

2.4 Dimensi Pelaksanaan Kebijakan Publik	16
2.5 Konsep Implementasi Kebijakan Publik	18
2.6 Program Sembako	23
2.7. Penelitian relevan	27
2.8. Kerangka berfikir	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
3.1. Jenis Penelitian.....	34
3.2. Lokasi Penelitian.....	34
3.3. Waktu Penelitian	34
3.4. Informan Penelitian	35
3.5. Pengumpulan Data	36
3.6. Teknik Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
4.1 Hasil Penelitian	40
4.1.1 Sejarah Kantor Kelurahan Bandar Selamat Medan.....	40
4.1.2 Visi dan Misi Kantor Kelurahan Bandar Selamat Medan.....	41
4.1.3 Tugas dan Tanggung Jawab di Kantor Kelurahan Bandar Selamat.....	43
4.1.4 Struktur organisasi di Kantor Kelurahan Bandar Selamat Medan.....	42
4.2 Pembahasan Penelitian.....	43
4.2.1. Peranan Implementasi Program Sembako Pada Pandemi Covid-19 di kantor Kelurahan Bandar Selama	49

BAB V KESIMPULAN.....	60
5.1 Kesimpulan.....	60
5.2 Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN.....	65



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	30
Gambar 4.4 Struktur organisasi.....	42
Gambar 4.1 SOP di Kantor Kelurahan Bandar Selamat.....	43



DAFTAR TABEL

Gambar 3.1 Waktu Penelitian.....34



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	65
Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian.....	69
Lampiran 3 Surat Selesai Penelitian	72
Lampiran 4 Hasil Turnitin.....	73



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peran pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi rendah yang mengakibatkan tingkat kemiskinan menjadi suatu kondisi absolut dan relatif di suatu wilayah dimana masyarakat tidak mencukupi kebutuhan dasar sesuai tata nilai yang berlaku. Jika dipandang dari aspek ekonomi, kemiskinan menunjukkan antara lemahnya keinginan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan suatu permasalahan dalam kehidupan masyarakat, keadaan dimana ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya.

Kemiskinan merupakan masalah kompleks tentang kesejahteraan yang dipengaruhi berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti kurangnya kebutuhan pangan akibat rendahnya tingkat pendapatan masyarakat. Indonesia merupakan negara berkembang, dimana masalah kemiskinan menjadi tantangan terbesar yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia. Untuk membantu menyelesaikan masalah kemiskinan, pemerintah Indonesia terkhususnya pemerintah kota Medan harus lebih memperhatikan kehidupan masyarakat, seperti menyalurkan bantuan sosial berupa sembako kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan demi mensejahterakan masyarakat ekonomi rendah.

Pemerintah Kota Medan sejauh ini dinilai belum bisa menekan angka kemiskinan walaupun sudah memberikan bantuan berupa bantuan sosial sembako sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako yang ditetapkan Mensos Tri Rismaharini di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2021, serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako Tahun 2021 Nomor 950. Maka bantuan sembako secara resmi di bagiakan kepada masyarakat yang dianggap kurang mampu yang penyalurannya dilakukan kepada setiap lapisan masyarakat baik itu melalui pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga ke pelosok desa.

Pemerintah kelurahan sebagai wilayah administrasi publik yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah kota dalam melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Program Sembako sudah dijalankan di seluruh wilayah di Indonesia, salah satunya yaitu di kelurahan bandar selamat medan. Kelurahan bandar selamat merupakan salah satu daerah yang mengalami dampak dalam rendahnya bidang kesejahteraan dan ekonomi. Oleh karena itu, untuk menjaga ketahanan ekonomi masyarakat kelurahan bandar selamat membuat suatu kebijakan dengan maksud dapat meringankan beban masyarakat ekonomi rendah dalam memenuhi kebutuhan maka dari itu program bantuan sosial berupa sembako menjadi solusi yang harus diterapkan demi mengatasi persoalan tersebut.

Kelurahan Bandar Selamat yang menyelenggarakan program bantuan sosial berupa sembako yang berada di provinsi Sumatera Utara Kecamatan Medan Tembung yang memiliki 12 lingkungan dan memiliki sekitar 4559 KK. Dari 1498 KK miskin tersebut yang sudah didata hanya diambil 40 KK miskin dari setiap

per lingkungan yang terdaftar dalam penerima bantuan sosial sembako berupa beras 20 kg, gula 2 kg, dan minyak goreng 1liter dengan upaya membantu pemenuhan gizi masyarakat golongan ekonomi rendah.

Berdasarkan hasil prapenelitian, pemerintah dan aparatur Kelurahan Bandar Selamat belum sepenuhnya melaksanakan tugasnya dengan baik. Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang seharusnya menerima bantuan belum menerima haknya, kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia dari aparatur Kelurahan, terbatasnya kemampuan aparatur dalam melakukan survei terhadap masyarakat, komunikasi yang kurang diantara aparatur dengan masyarakatnya, masih banyak dijumpai pelaksana kebijakan yang tidak melaksanakan kebijakan secara baik menurut prosedur penyaluran, serta adanya aparatur yang tidak adil dalam memberikan bantuan, dimana mereka terlalu mementingkan rasa kekeluargaan dibandingkan masyarakat lain yang sangat membutuhkan bantuan. Untuk mengetahui secara jelas tentang permasalahan di atas membutuhkan sebuah penelitian yang akurat. Ditinjau dari permasalahan yang telah diuraikan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul skripsi **“Implementasi Program Sembako di Kelurahan Bandar Selamat Medan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Implementasi Program Sembako di Kelurahan Bandar Selamat Medan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi Program Sembako di Kelurahan Bandar Selamat.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang Administrasi Publik, Manajemen Sumber daya Manusia dan Implementasi sebuah Kebijakan

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam menggunakan ilmu dan teori yang

diperoleh selama mengikuti perkuliahan dengan membandingkannya pada fakta di lapangan.

b. Bagi Civitas Akademika

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan, pertimbangan dan perbandingan bagi kalangan akademisi, mengenai implementasi program sembako, serta menjadi acuan pada penelitian selanjutnya yang sejenis.

c. Bagi Kantor Kelurahan Bandar Selamat

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan implementasi suatu kebijakan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Implementasi

Menurut George C. Edward III (2010:97), mengatakan bahwa “implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan”. Menurut Syaukani (2004 : 295), Implementasi adalah pelaksanaan serangkaian kegiatan dalam rangka untuk memberikan kebijakan publik sehingga kebijakan dapat membawa hasil, seperti yang diharapkan.

Dalam pendekatan yang diterapkan oleh George C.Edward III (1980, 16), terdapat 4 indikator yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang akan terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan baru dapat berjalan jika komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implemementasi harus di komunikasikan kepada bagian personalia yang tepat. Kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat dan konsisten. Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para

implementator semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Menurut Edward III dalam Widodo (2010:97), pendekatan korespondensi memiliki beberapa aspek, antara lain unsur transmisi, keterusterangan dan konsistensi.

- a) Komponen strategi publik yang disampaikan diteruskan kepada pelaksana strategi maupun kepada sasaran strategi dan individu-individu lain yang terlibat erat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- b) Aspek pendekatan (*lucidity*) sehingga pengaturan yang dikirimkan kepada pelaksana, target gathering dan individu-individu lain yang terlibat secara jelas sehingga mereka menyadari apa yang tersirat, tujuan, dan substansi strategi publik masing-masing akan mewujudkan apa yang harus siap dan dijalankan. untuk membuat pengaturan berhasil dan efektif.
- c) Unsur konsistensi (*konsistensi*) diperlukan agar pengaturan yang diambil tidak membingungkan sehingga menarik dalam pelaksanaan pendekatan, pengumpulan target dan individu yang terlibat secara dekat.

2. Sumber daya

Sumberdaya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan dengan baik. Indikator ini digunakan untuk melihat sejauh mana sumberdaya dapat berjalan dengan baik dan rapi, yaitu staf, informasi, wewenang dan fasilitas. Edward III dalam Widodo (2010: 98) merekomendasikan bahwa faktor aset memainkan peran penting dalam pelaksanaan pendekatan. Sesuai Edward III dalam Widodo (2010: 98) bahwa

aset tersebut meliputi SDM, aset rencana keuangan, dan aset peralatan dan aset otoritas.

a. Sumber Daya Manusia

SDM merupakan variabel yang mempengaruhi hasil eksekusi strategi. Edward III dalam Widodo (2010:98) menyatakan bahwa “mungkin aset utama dalam menjalankan strategi adalah staf” (mungkin aset utama dalam melakukan pendekatan adalah staf). Edward III dalam Widodo (2010: 98) menambahkan “terlepas dari seberapa jelas dan dapat diprediksi permintaan eksekusi dan terlepas dari seberapa tepat mereka dikomunikasikan, dalam hal fakultas yang bertanggung jawab untuk melakukan pengaturan meleset dari aset agar benar-benar berfungsi. Keras, eksekusi tidak akan menarik” (terlepas dari seberapa jelas dan mantap permintaan untuk eksekusi dan ketepatan dikirim, dengan asumsi staf yang bertanggung jawab untuk mengeksekusi strategi kekurangan aset untuk bekerja secara efektif, eksekusi tidak akan layak).

b. Aset Rencana Pengeluaran

Edward III dalam Widodo (2010: 100) mengungkapkan bahwa “penyelidikan terhadap masyarakat perkotaan baru menunjukkan bahwa terbatasnya stok motivator pemerintah merupakan pendukung signifikan kekecewaan program”. Seperti yang ditunjukkan oleh Edward III, kekuatan motivasi terbatas yang diberikan kepada pelaksana adalah pendorong utama kekecewaan pelaksanaan program. Edward III dalam Widodo (2010:101) berpendapat bahwa aset rencana belanja yang dibatasi akan mempengaruhi

hasil eksekusi strategi. Terlebih lagi, program tidak dapat dijalankan secara ideal, keterbatasan rencana keuangan membuat sikap para entertainer strategi menjadi rendah.

c. Aset Perangkat Keras

Edward III dalam Widodo (2010:102) menyatakan bahwa perangkat keras adalah suatu metode yang digunakan untuk operasionalisasi pelaksanaan suatu strategi yang meliputi struktur, tanah, dan kantor, yang kesemuanya akan mempermudah untuk menawarkan jenis bantuan dalam pelaksanaan strategi.

d. Aset Otoritas

Aset lain yang sangat signifikan dalam memutuskan eksekusi strategi adalah otoritas. Sesuai Edward III dalam Widodo (2010:103) menyatakan bahwa: Kekuasaan (posisi) yang cukup untuk berjalan dengan pilihannya sendiri yang diklaim oleh suatu yayasan akan berdampak pada organisasi dalam menjalankan suatu strategi. Kewenangan ini menjadi signifikan ketika mereka dihadapkan pada suatu masalah dan harus segera diselesaikan dengan sebuah pilihan. Dengan cara ini, Edward III dalam Widodo (2010:103) menyatakan bahwa strategi utama penghibur harus diberikan kekuatan yang memadai untuk menentukan pilihan mereka sendiri untuk melaksanakan pengaturan di bawah posisi mereka.

3. Disposisi

Disposisi pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai implementasi suatu kebijakan. Jika implementasi suatu

kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktik tidak menjadi bias. Unsur-unsur yang menjadi pertimbangan Edward III dalam Agustinus (2006:159-160) mengenai sikap dalam pelaksanaan strategi terdiri dari:

- a. Pengangkatan perwakilan.. Sikap atau disposisi pelaksana akan membuat hambatan nyata untuk pelaksanaan strategi jika tenaga kerja saat ini tidak melakukan pendekatan yang diinginkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Konsekuensinya, pemikiran dan penentuan strategi pelaksana staf harus menjadi individu yang berkomitmen pada pengaturan yang telah ditetapkan, terlebih lagi secara eksplisit untuk kepentingan daerah setempat.
- b. Insentif adalah salah satu metode yang diusulkan untuk mengatasi masalah sikap pelaksana strategi dengan mengendalikan kekuatan motivasi. Pada dasarnya individu bergerak dalam melihat keuntungan mereka sendiri, kemudian mengendalikan motivator oleh pencipta strategi untuk mempengaruhi kegiatan pelaksana strategi. Dengan memperluas manfaat atau pengeluaran tertentu, itu bisa menjadi elemen pendorong yang membuat pelaksana melakukan pesanan dengan baik. Ini selesai sebagai pekerjaan untuk memuaskan kepentingan individu atau hierarkis.

Salah satu elemen yang mempengaruhi kecukupan eksekusi strategi adalah disposisi praktisi. Jika pelaksana setuju dengan hal-hal dalam strategi, mereka akan menjalankannya dengan riang tetapi jika perspektif mereka tidak sama

dengan pembuat rencana, siklus eksekusi akan menemui banyak masalah. Ada tiga jenis disposisi/reaksi implementor terhadap strategi; perhatian kepada pelaksana, pedoman/tajuk pelaksana untuk menjawab program terhadap pengakuan atau pemberhentian, dan kekuatan reaksi.

Pelaksana mungkin dapat menangkap maksud dan tujuan program namun seringkali lalai menjalankan program dengan baik dengan alasan mereka menolak tujuan yang terkandung di dalamnya sehingga secara halus mengarahkan dan menjauhi pelaksanaan program. Selain itu, bantuan otoritas pelaksana juga sangat dibutuhkan dalam pencapaian target program. Dukungan dari pihak yang berwenang sangat mempengaruhi pelaksanaan program untuk mencapai tujuan secara nyata dan efektif.

Bentuk dukungan administrasi ini adalah menempatkan strategi sesuai kebutuhan program, menetapkan pelaksana dengan individu yang mendukung program, fokus pada keseimbangan lokal, agama, kebangsaan, orientasi dan kualitas segmen lainnya. Penataan aset yang memadai untuk memberikan motivator bagi pelaksana program sehingga mendukung dan bekerja sama dalam menjalankan strategi/program.

4. Struktur birokrasi

Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat SOP (Standar Operasional Prosedur). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran

kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi itu sendiri, dimana struktur birokrasi yang terlalu panjang dan fragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Edward III dalam Widodo (2010:107) menyatakan bahwa: serta apakah prinsip kerja jelas, baik mengenai komponen, kerangka kerja dan metodologi untuk melaksanakan pengaturan, pembagian tugas utama, kemampuan dan spesialis, dan kewajiban di antara penghibur, dan ketidakharmonisan. hubungan antar asosiasi. pelaksana satu sama lain juga menentukan hasil eksekusi strategi. Meskipun demikian, mengingat efek samping dari eksplorasi Edward III dalam Winarno (2005:152) masuk akal bahwa: SOP mungkin akan menjadi hambatan untuk pelaksanaan pengaturan baru yang memerlukan pendekatan yang lebih baik untuk bekerja atau jenis staf baru untuk dilaksanakan. strategi keluar. Akibatnya, semakin menonjol kebutuhan strategi untuk berubah dengan cara yang khas dalam suatu asosiasi, semakin penting kemungkinan SOP mencegah pelaksanaan.

2.2 Pengertian Kebijakan Publik

Thomas R. Color dalam Ayuningtyas (2014: 8) mengatakan bahwa "segala sesuatu yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah". Pendekatan publik adalah segala sesuatu yang diputuskan oleh otoritas publik untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Penilaian yang sebanding

dikomunikasikan oleh Edward III dan Sharkansky dalam Islamy (1984: 18), yang berpendapat bahwa strategi publik adalah "apa yang dikatakan dan dilakukan pemerintah, atau tidak dilakukan. Ini adalah tujuan atau alasan inisiatif yang didukung pembayar pajak".

Strategi publik adalah segala sesuatu yang diputuskan oleh otoritas publik untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Perasaan sesuai dengan apa yang dikatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh otoritas publik. Strategi adalah sekumpulan tujuan dan sasaran dari inisiatif yang didukung pembayar pajak. Strategi publik menurut Friedrich (1969) dalam Agustino (2008:7) adalah perkembangan kegiatan/latihan yang diusulkan oleh individu, pertemuan atau pemerintah dalam iklim tertentu di mana terdapat hambatan (tantangan) dan hasil yang dapat dibayangkan (pintu terbuka yang berharga). di mana pendekatan diusulkan untuk menjadi berharga dalam menaklukkannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

2.3 Aspek-aspek yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan Publik

Menurut Edwards III (2010:97, eksekusi strategi dapat diuraikan sebagai komponen fase interaksi strategi, yang posisinya berada di antara fase definisi strategi dan hasil yang dibawa oleh strategi (hasil). Selain itu, Edward III membedakan sudut yang terkait erat dengan penambahan eksekusi strategi, untuk lebih spesifik: korespondensi, aset, sikap atau disposisi pelaksana, dan desain peraturan. Keempat sudut tersebut mempengaruhi pelaksanaan strategi, baik

secara langsung maupun tidak langsung, dan setiap sudut pandang mempengaruhi perspektif yang berbeda (Wahyudi, 2016).

a. Kewenangan/Struktur Birokrasi

Wewenang adalah kekuatan/keahlian bagi para pelaksana dalam menyelesaikan strategi-strategi yang diselesaikan secara politik (Afandi dan Warjio, 2015). Kewenangan ini terkait dengan konstruksi regulasi yang ditambahkan pada posisi/lapisan yayasan atau individu sebagai pelaksana strategi. Atribut dasar administrasi sebagian besar terdapat pada sistem kerja atau Standard Operating Procedures (SOP) dan otoritatif diskontinuitas.

b. komunikasi

Korespondensi adalah suatu tindakan yang membuat orang lain menguraikan suatu pemikiran/pemikiran, khususnya apa yang diharapkan oleh penutur atau penulis karangan melalui kerangka konvensional (normal), baik dengan gambaran, tanda, maupun tingkah laku (Wardhani, Hasiolan, dan Minarsih, 2016). Korespondensi mempengaruhi pelaksanaan strategi publik, di mana korespondensi yang buruk dapat sangat mempengaruhi eksekusi strategi.

Komponen korespondensi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pendekatan publik meliputi: transmisi, konsistensi, dan kejelasan (Winarno, 2012). Pencapaian eksekusi strategi publik yang efektif mengharuskan para pelaksana menyadari apa yang harus dilakukan dengan jelas; tujuan dan sasaran strategi harus diberikan pada pengumpulan tujuan untuk mengurangi kesenjangan antara penyusunan strategi dan pelaksanaan. Jika penyampaian data tentang maksud dan

tujuan suatu strategi ke pengumpulan tujuan tidak jelas, dapat dibayangkan halangan dari pengumpulan tujuan (Afandi dan Warjio,2015).

Kemampuan relasional dikoordinasikan sehingga pelaksana gerakan dapat saling tawar-menawar dan melacak tujuan yang biasanya bermanfaat untuk mencari tahu/kesepakatan. Perjanjian yang dibuat dapat bekerja pada eksekusi pribadi di tempat kerja dengan menemukan kondisi manfaat bersama untuk setiap masalah (Ramdhani dan Suryadi, 2005).

c. Sumberdaya

Eksekusi strategi harus ditopang oleh aksesibilitas aset (manusia, material, dan teknik). Pelaksanaan strategi publik harus dilakukan dengan hati-hati, jelas, dan andal, namun jika para pelaksana meleset dari aset-aset penting, pelaksanaan pengaturan cenderung tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh. Tanpa bantuan aset, penataan hanya akan menjadi laporan yang tidak dipahami untuk memberikan jawaban atas persoalan yang ada di daerah, atau upaya menawarkan jenis bantuan kepada daerah. Oleh karena itu, aset merupakan pertimbangan yang signifikan untuk melakukan pengaturan terbuka. Aset dalam pelaksanaan strategi publik meliputi: staf yang memuaskan, data, pembiayaan, wewenang, dan kantor pendukung lainnya (Afandi dan Warjio, 2015).

d. Sikap atau disposisi agen

Sikap adalah orang dan kualitas yang digerakkan oleh pelaksana strategi, seperti tanggung jawab, disiplin, keaslian, wawasan, dan sifat berbasis suara (Wahab, 2010). Dalam hal pelaksana strategi memiliki sikap yang baik, ia sangat terkait dengan penyelesaian strategi dengan baik, bertentangan dengan norma jika

pelaksana strategi memiliki disposisi atau sudut pandang yang tidak sesuai dengan rencana dan jalannya strategi. , dapat dibayangkan bahwa siklus eksekusi strategi tidak akan berhasil dan efektif. Sikap atau watak para pelaksana akan mendukung atau menghalangi pelaksanaan strategi dengan mengandalkan kewajaran keterampilan dan mentalitas eksekusi. Dengan cara ini, pilihan dan kepastian strategi pelaksana membutuhkan orang-orang yang memiliki keterampilan dan pengabdian yang tepat terhadap pengaturan yang telah ditetapkan (Afandi dan Warjio, 2015).

2.4 Dimensi Pelaksanaan Kebijakan Publik

Mengingat beberapa ide dan gagasan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Good Governance, menurut pemahaman pencipta, pelaksanaan strategi dapat diperkirakan/dinilai dengan memperhatikan aspek-aspek berikut: konsistensi, keterusterangan, tanggung jawab, kewajaran, kelangsungan hidup. , dan produktivitas.

a. Konsistensi

Eksekusi strategi berjalan dengan baik jika eksekusi strategi dilakukan dengan andal dengan tetap berpegang pada teknik dan standar yang relevan (Mutiasari, Yamin, dan Alam, 2016).

b. Keterusterangan

Keterusterangan adalah peluang masuknya data yang seharusnya diketahui oleh orang-orang pada umumnya maupun individu-individu yang terlibat (Coryanata, 2012). Data yang terkait dengan pelaksanaan strategi publik harus

terbuka, sederhana, dan tersedia untuk semua kalangan yang membutuhkan, dan memberikan secara memuaskan, dan lugas (Rohman, 2016).

c. Tanggung jawab

Setiap gerakan eksekusi strategi terbuka harus bertanggung jawab baik secara otoritatif maupun bermakna, sesuai pengaturan peraturan (Rohman, 2016).

d. Ekuitas

Pemerataan secara keseluruhan dapat dipersepsikan sebagai kebaikan, keunggulan, dan kebenaran, yang mengikat warga negara sebagai satu kesatuan antara pemanfaatan hak istimewa dan pelaksanaan komitmen (Nasution, 2016).

Keadilan dalam pengaturan terbuka muncul dalam latihan bantuan yang tidak bias. Pelaksanaan pengaturan publik tidak memisahkan sifat administrasi dengan tujuan berkumpul dalam pertimbangan identitas, ras, agama, golongan, kesejahteraan ekonomi, dan lain-lain (Rohman, 2016).

e. Partisipatif

Local area support adalah kontribusi dan kerjasama daerah dalam pelaksanaan pendekatan. Kerjasama daerah serta mendukung percepatan pelaksanaan strategi, sekali lagi akan mempengaruhi proses penilaian/pengendalian terhadap pelaksanaan pemerintahan dan dapat membatasi penyalahgunaan kekuasaan. Kerjasama daerah merupakan cara untuk maju dalam melakukan pendekatan terbuka karena dukungan mencakup bagian dari manajemen dan keinginan. Pengawasan yang disinggung di sini mencakup pengelolaan pimpinan melalui badan pembuat undang-undang (Coryanata, 2012).

Berdasarkan gambaran tersebut, maka pelaksanaan strategi harus bersifat

partisipatif, khususnya pelaksanaan pengaturan yang dapat memberdayakan kerjasama daerah dengan mempertimbangkan keinginan, kebutuhan, kepentingan, dan asumsi daerah (Rohman, 2016).

f. Kelangsungan hidup

Viabilitas terkait dengan pencapaian hasil yang telah ditentukan sebelumnya, atau pencapaian target pelaksanaan kegiatan, yang terkait dengan bagian dari kebijaksanaan khusus, dan terus-menerus diperkirakan efek samping atau unit administrasi (Dunn, 2003). Dalam pelaksanaan pendekatan publik, kecukupan diperkirakan dari hasil pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam strategi terbuka.

g. Efektivitas

Kemahiran berhubungan dengan seberapa banyak pemanfaatan aset yang diharapkan untuk menciptakan tingkat kelangsungan hidup tertentu. Produktivitas adalah hubungan antara kecukupan dan penggunaan aset (Dunn, 2003). Penanda tindakan yang dapat digunakan dalam aspek profisiensi adalah pemanfaatan aset yang diharapkan untuk mencapai tujuan yang dinyatakan, yang dapat diperkirakan dengan tingkat tujuan waktu, biaya, individu, perangkat keras, dan aset yang berbeda

2.5 Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Arti eksekusi menurut Jones (1991), di mana eksekusi dicirikan sebagai "mengurus bisnis" dan "melakukannya". Eksekusi strategi adalah interaksi pendekatan yang seharusnya dapat dilakukan tanpa masalah. Berbeda dengan

pelaksanaan pengaturan, baik beruntung atau tidak beruntung, akan sangat dipengaruhi oleh cara berperilaku para pelaksana strategi. Padahal, pelaksanaan strategi merupakan bagian penting dari keseluruhan pelaksanaan proses pembuatan pengaturan.

Ide eksekusi semakin diuji bersama banyak ahli yang menyumbangkan pemikiran tentang eksekusi strategi sebagai salah satu fase dari interaksi pendekatan. Wahab dan beberapa pencipta menempatkan tahap eksekusi strategi di posisi alternatif, namun pada tingkat dasar setiap strategi terbuka terus-menerus dilingkari kembali keeksekusi strategi. Eksekusi dianggap sebagai struktur utama dan tahap yang sangat konklusif dalam siklus strategi.

Pandangan ini ditegaskan oleh penjelasan Edwards III bahwa tanpa eksekusi yang kuat, pilihan pembuat strategi tidak akan dijalankan secara efektif. Eksekusi strategi adalah suatu gerakan yang terlihat setelah lahirnya suatu bantalan yang substansial dari suatu strategi yang mencakup upaya-upaya untuk mengawasi kontribusi untuk memberikan hasil atau hasil bagi daerah setempat. Penggambaran langsung dari ide eksekusi dikemukakan oleh Lane bahwa eksekusi sebagai sebuah ide dapat dibagi menjadi dua bagian, khususnya eksekusi adalah kondisi yang berguna dari harapan, dan hasil.

Dilihat dari gambarannya, persamaan eksekusi adalah kemampuan yang terdiri dari rencana dan alasan, hasil sebagai item, dan hasil selanjutnya. Apalagi eksekusi adalah kondisi praktis dari strategi, formator, praktisi, inisiator, dan waktu (Sabatier, 1986:21-48). Penekanan utama dari kedua kemampuan ini adalah

pada strategi yang sebenarnya, kemudian, pada saat itu, hasil yang dicapai dan dilakukan oleh praktisi dalam jangka waktu tertentu.

T.B. Smith memandang bahwa ketika suatu strategi telah dibuat, maka strategi itu harus dilaksanakan dan hasilnya cukup jauh dari apa yang umumnya diantisipasi oleh para pembuat strategi (Nakamura dan Smallwood, 1980: 2). Setiap kali dibayangkan, akan terlihat bahwa strategi memiliki tujuan yang jelas. Eksekusi strategi diperlukan dengan alasan bahwa pada tahapan tersebut cenderung terlihat “kepentasan” dari berbagai penentu kemajuan pelaksanaan pengaturan atau program.

Alasan ini sesuai dengan pemahaman Korten dan Syahrir (1980) bahwa kelangsungan hidup suatu strategi atau program bergantung pada derajat kesesuaian antara program dan penerima, kesesuaian program dengan asosiasi pelaksana dan kesesuaian program. kelompok penerima dan perkumpulan pelaksana. Terlepas dari alasan tersebut, eksekusi strategi diharapkan dapat melihat hubungan antara eksekusi strategi dan variabel yang berbeda.

Edward III dalam Widodo (2010:107) menyatakan bahwa: serta apakah prinsip kerja jelas, baik mengenai komponen, kerangka kerja dan metodologi untuk melaksanakan pengaturan, pembagian tugas utama, kemampuan dan spesialis, dan kewajiban di antara penghibur, dan ketidakharmonisan. hubungan antar asosiasi. pelaksana satu sama lain juga menentukan hasil eksekusi strategi. Meskipun demikian, mengingat efek samping dari eksplorasi Edward III dalam Winarno (2005:152) masuk akal bahwa: SOP mungkin akan menjadi hambatan untuk pelaksanaan pengaturan baru yang memerlukan pendekatan yang lebih baik

untuk bekerja atau jenis staf baru untuk dilaksanakan. strategi keluar. Akibatnya, semakin menonjol kebutuhan strategi untuk berubah dengan cara yang khas dalam suatu asosiasi, semakin penting kemungkinan SOP mencegah pelaksanaan.

Edward III dalam Winarno (2005:155) mengartikan bahwa “perpecahan adalah peredaran kewajiban mengenai suatu strategi kepada beberapa organisasi tertentu sehingga memerlukan koordinasi” Edward III dalam Widodo (2010:106), mengatakan bahwa: konstruksi peraturan yang terbagi (terpisah atau terpecah) dapat menimbulkan kekecewaan korespondensi, karena peluang untuk berubah arah sangat besar. Semakin banyak eksekusi pengaturan yang berbelit-belit, semakin diperlukan koordinasi yang terkonsentrasi”

Menyinggung pandangan Edward III mengenai model-model penting dalam pelaksanaan pengaturan, empat unsur dapat dinyatakan sebagai penyebab masalah serta prasyarat untuk hasil siklus eksekusi, yaitu korespondensi khusus, aset, mentalitas regulasi atau pelaksana dan desain hierarkis. , termasuk alur kerja administrasi. Komunikasi dalam suatu program harus dilakukan dengan tepat jika jelas bagi para pelaksana. Ini menyangkut metode yang terlibat dengan penyampaian data, kejelasan data dan konsistensi data yang dikirimkan. Aset, termasuk empat bagian, khususnya staf yang memadai (jumlah dan kualitas), data yang diperlukan untuk navigasi, posisi yang memadai untuk menyelesaikan tugas atau kewajiban dan kantor yang diperlukan dalam pelaksanaan. Sikap atau watak pelaksana merupakan kewajiban pelaksana terhadap program. Konstruksi regulasi tergantung pada metode kerja standar yang mengarahkan proses kerja dan eksekusi strategi. Jaminan untuk kelancaran pelaksanaan strategi adalah

penyebaran yang sangat terarah. Ada empat prasyarat untuk mengawasi penyebaran strategi, khususnya:

1. Ada penghargaan bagi individu dari orang-orang pada umumnya untuk spesialis pemerintah untuk mengklarifikasi persyaratan untuk secara etis sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh para spesialis.
2. Ada perhatian untuk mengakui pendekatan. Kesiapan untuk mengakui dan melaksanakan pengaturan diakui ketika pendekatan tersebut dianggap sah.
3. Kepastian bahwa pendekatan dilakukan secara legal.
4. Memahami bahwa meskipun suatu strategi pada awalnya dipandang dapat diperdebatkan, setelah beberapa waktu, pengaturan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang harus dijalankan.

Menurut Dunn dan William N. (1981) pelaksanaan penataan pada tingkat dasar memiliki 3 (tiga) model, yaitu:

1. Point of view Model, yaitu jenis investigasi strategi yang memandu tinjauannya terhadap hasil dari suatu pengaturan "sebelumnya" suatu pengaturan dijalankan. Model ini dapat disebut sebagai model yang berguna. Karena sering kali mencakup prosedur estimasi untuk memperkirakan hasil yang mungkin muncul dari strategi yang diusulkan
2. Review model, yaitu pengujian strategi yang diselesaikan terhadap dampak dari suatu pendekatan "nanti" suatu pengaturan dilakukan. Model ini biasanya disebut model evaluatif, karena menggunakan cara penilaian untuk menghadapi dampak dari strategi yang sekarang dan selanjutnya telah dilakukan.

3. Model Integratif, yang merupakan perpaduan antara model yang akan datang dan model tinjauan Model ini dalam banyak kasus disebut model lengkap atau komprehensif, karena pengujian ini dijatuhkan oleh hasil strategi yang mungkin sebelum atau sesudah pelaksanaan atau kegiatan.

2.6 Program Sembako

Program Sembako merupakan penyempurnaan dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai program perubahan bantuan pangan untuk menjamin agar program lebih terarah, tepat jumlah, cemerlang, tepat biaya, kualitas, dan dalam organisasi. Seperti halnya program BPNT, program Sembako seharusnya memberikan keputusan kepada penerima dalam memilih jenis, kualitas, biaya, dan tempat untuk membeli makanan.

Untuk program Sembako, pemerintah membangun nilai bantuan dan menumbuhkan jenis barang yang dapat dibeli sehingga tidak hanya dalam kerangka beras dan telur seperti pada program BPNT, tetapi juga berbagai barang kebutuhan masyarakat, protein hewani, protein nabati beserta zat gizi dan mineral sebagai upaya Pemerintah untuk memberikan akses kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terhadap bahan makanan pokok dengan zat gizi lainnya.

Program sembako ini merupakan penyempurnaan dari Bantuan Pangan Non Tunai yang telah lalu dan dapat digunakan sebagai pedoman, atau rambu khusus oleh pelaksana program, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Pengalih, e-warong sebagai spesialis alat angkut makanan, dan pihak terkait lainnya. Program Dalam rangka mengupayakan kecukupan dan ketepatan

pemusatan peruntukan bantuan sosial serta untuk memberdayakan pertimbangan moneter, Presiden Republik Indonesia memberikan bantalan agar bantuan ramah tamah dan wakaf disebarluaskan secara nontunai.

Program bantuan sosial sembako yang sudah menjadi Subsidi Rastra mulai diubah menjadi bantuan pangan non tunai (BPNT) pada tahun 2017 dari 44 masyarakat terpilih perkotaan. Menjelang akhir tahun 2019, program Bansos Pangan di seluruh masyarakat kelurahan/kelurahan dilaksanakan dengan nontunai atau melalui program BPNT dengan memanfaatkan kartu elektronik yang diberikan langsung kepada KPM. BPNT disampaikan kepada KPM dengan memanfaatkan kerangka keuangan, yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan beras atau telur potensial di E-Warong, sehingga KPM juga mendapat rezeki yang lebih disesuaikan.

Pada tahun 2020, untuk memahami penguatan jaminan sosial dan peningkatan kelangsungan program bansos pangan, maka dibentuklah program BPNT menjadi program Sembako. Dengan program Sembako, berkas panduan bertambah dan jenis barang yang bisa dibeli bertambah sehingga tidak hanya dalam kerangka beras dan telur seperti pada program BPNT. Ini adalah pekerjaan dari Pemerintah untuk memberikan akses KPM untuk bahan-bahan penting dengan bahan-bahan sehat lainnya.

Pada program sembako ini masyarakat miskin atau masyarakat golongan ekonomi rendah menjadi sasaran dari adanya program. Dengan adanya program ini diharapkan masyarakat merasa terbantu meskipun tidak semuanya karena keterbatasan bantuan. Kelurahan Bandar Selamat menjadi salah satu wilayah

terlaksananya program sembako karena di wilayah ini banyak masyarakat yang memerlukan bantuan untuk menyambung hidup. Dengan Adanya Program Sembako di Kelurahan Bandar Selamat ini diharapkan dapat mengurangi sedikit beban pengeluaran keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Program ini yang memberikan bantuan sosial berupa sembako, sehingga dapat memastikan sebagian kebutuhan dasar keluarga miskin terpenuhi.

Dari 4559 KK masyarakat Kelurahan Bandar Selamat yang terdiri dari 12 lingkungan kelurahan ini namun hanya 40 kk dari setiap lingkungan saja yang dipilih yang benar-benar membutuhkan dan berhak mendapatkan bantuan sembako sesuai dengan ketersediaan bantuan yang sudah didata. Masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan dari program ini ialah masyarakat yang terdaftar sebagai KK miskin atau masyarakat golongan ekonomi rendah. Selain itu pengembangan jenis bantuan sosial berupa sembako yang didapatkan dari Program ini akan mampu meningkatkan gizi masyarakat, terutama anak-anak sejak dini agar memiliki pengaruh terhadap penurunan masalah kekurangan gizi. Dalam program ini jenis bantuan yang diberikan kepada masyarakat berupa beras 20 kg, gula 2 kg, dan minyak goreng 1 liter pada setiap 1 KK.

Berikut peraturan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program sembako oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini 19 Agustus 2021 yang menjadi acuan terlaksananya program. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program bantuan sosial bahan Pangan Tahun 2021 Nomor 950. Untuk diketahui semua orang, berikut dasar hukum program sembako yaitu:

1. Peraturan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai.
3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Pangan Pokok.

Tujuan dari Program sembako adalah:

1. Menurunkan beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan kebutuhan pangan yang tidak terpenuhi.
2. Memberikan rezeki yang lebih disesuaikan dengan KPM.
3. Mengembangkan lebih lanjut ketepatan sasaran, waktu, jumlah, nilai, kualitas, dan organisasi.
4. Memberikan keputusan dan kontrol kepada KPM dalam menangani kebutuhan pangan.

Keunggulan Program Pangan Pokok adalah:

1. Memperluas ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai instrumen jaminan sosial dan pengurangan kebutuhan
2. Memperluas kemahiran penyebaran bantuan sosial
3. Memperluas komunitas ke administrasi moneter dan perbankan
4. Perluasan bursa nontunai dalam rencana Gerakan Nasional Nontunai
5. Memperluas pembangunan moneter di daerah, khususnya usaha kecil dan swasta di bidang pertukaran

6. Dalam jangka panjang mencegah halangan dengan memuaskan rezeki dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Program Sembako merupakan bantuan sosial pangan senilai Rp. 200.000/KPM/bulan yang disalurkan secara nontunai dari Pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara konsisten melalui sistem kas elektronik. Aset bantuan program Sembako digunakan secara eksklusif untuk membeli bahan makanan yang tidak dipatok untuk program Sembako di e-warong dan tidak dapat diambil dengan uang sungguhan..

2.7 Penelitian Relevan

Penelitian relevan merupakan yang penting dalam pemeriksaan terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut adalah beberapa peneltiang yang saling berkaitan yang berlaku:

1. Penelitian Aldi Sajjan, penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Dalam Upaya Mengatasi Masalah Perekonomian Akibat Pandemi Covid di Kota Mataram” Tahun 2020.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Standar dan Sasaran Kebijakan dalam Pelaksanaan program BST di Kota Mataram sangat layak. Apalagi dari sisi prosedural sudah berjalan sesuai komponen yang ada, meski seolah-olah cadangan pemandu belum sepenuhnya siap membendung kebutuhan mereka dalam sebulan. Dari sisi ekologis (Ekonomi, Sosial dan Politik), pelaksanaan program BST masih menjadi pertanyaan, khususnya mengenai isu informasi KPM yang belum ditemukan salinan informasinya. Hal ini membuat eksekusi program BST menjadi

tidak efektif dan mungkin tidak on track. Oleh karena itu, beberapa pihak dan tandan menegur informasi KPM yang digunakan dalam peredaran cadangan program BST.

Hubungan antara proposisi ini dan pengujian yang akan dilakukan sama-sama mengarah pada mengetahui pelaksanaan program bantuan sosial, Teknik metode yang digunakan dalam penelitian ini juga sangat mirip, yaitu deskriptif tertentu dengan metodologi kualitatif yang jelas. Namun yang mempengaruhi antara kedua pemeriksaan tersebut adalah berbagai kekhasan/masalah dan daerah eksplorasi yang berbeda.

2. Penelitian Muhammad izwanda, penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Tunai Dana Desa Langsung Selama Pandemi Covid-19 Dalam Penanggulangan Miskin di Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat” Tahun 2020.

Alasan penelitian ini adalah untuk mencoba mendapatkan gambaran menyeluruh tentang Kebijakan BLT Dana Desa dalam penanganan masyarakat miskin di Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat. Penelitian ini menggunakan strategi subjektif dengan metode pemeriksaan informasi subjektif yang jelas. Untuk mendapatkan informasi secara komprehensif dan integratif, serta fokus pada pentingnya informasi untuk mencapai tujuan, dalam pengumpulan informasi pemeriksaan ini menggunakan tiga prosedur, yaitu rapat dari atas ke bawah, persepsi anggota dan studi kearsipan. Penelitian ini mengkaji dua kumpulan persepsi, yang pertama adalah persepsi tentang proses pelaksanaan program, dan yang kedua adalah persepsi tentang faktor pendukung dan

penghambat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program BLT Dana Desa berjalan dengan baik, mudah dan efisien. Tahapan pelaksanaan program BLT Dana Desa mulai dari pelaksanaan sosialisasi, pelaksanaan konfirmasi informasi rundown calon RTS, peredaran kartu BLT, pembayaran cadangan BLT, terakhir pembuatan laporan pelaksanaan. ekonomi daerah, kemampuan melaksanakan, puncak informasi daerah dan koordinasi antar pelaksana program.

Hubungan antara proposisi ini dan eksplorasi yang dilengkapi dengan poin yang sama adalah untuk memutuskan pelaksanaan strategi panduan. Strategi yang digunakan juga serupa menggunakan teknik metode deskriptif dengan metodologi yang jelas kualitatif. Bagaimanapun, yang berpengaruh adalah metode pemeriksaan informasi dan pengumpulan informasi. Juga, ada kontras dalam pengaturan keseluruhan ulasan.

3. Penelitian Amalia Nurhasana, penelitiannya berjudul “Efektivitas Bantuan Sosial Tunai (BST) Bagi Masyarakat Miskin Yang Terdampak Covid-19 di Desa Barus Jahe Kabupaten Karo” Tahun 2020.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa apa yang diberikan kepada orang miskin dikatakan menarik dengan asumsi itu dievaluasi dengan melihat delapan petunjuk kelayakan yang dikemukakan oleh Makmur. Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi subjektif yang berbeda dengan prosedur pemilihan informasi melalui studi pustaka, studi lapangan, persepsi, dan pertemuan atas ke bawah. Informasi yang diperoleh di lapangan kemudian

diperiksa oleh analis yang masuk akal secara subjektif. Akhirnya, tujuan ditarik dari konsekuensi peninjauan.

Hasil penelitian yang akan diselesaikan sama-sama memanfaatkan metode deskriptif kualitatif. Namun yang berpengaruh adalah metode pengumpulan informasi melalui studi tertulis dengan penelusuran informasi yang digunakan. Selanjutnya, kewajiban pabean juga diukur pada kesempatan dan area peninjauan.

2.8 Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini yang belum teratasinya masalah kemiskinan di Indonesia, sehingga mempengaruhi berbagai bagian kehidupan yang dapat memicu ketidakstabilan tatanan sosial, hal ini menyebabkan tingginya kriminal, Pendidikan memburuk, Kesehatan memburuk, menghancurkan kesejahteraan, dll. Pemerintah memberikan bantuan sosial dengan struktur yang berbeda mulai dari kebutuhan pokok, uang, dan bahkan hibah untuk siswa.

Pelaksanaan program sembako disampaikan kepada masyarakat jaringan yang terdampak kekurangan dalam kebutuhan hidup melalui beberapa tahapan. Tahapan tersebut adalah sebagai perencanaan, penyuluhan dan sosialisasi, pendaftaran dan pembagian bantuan, penyebaran program dan penggunaan program. Alasan diadakannya program sembako adalah untuk menjaga ketahanan pangan dan mengembangkan lebih lanjut rezeki daerah melalui bantuan yang berupa beras, gula, minyak goreng dan kebutuhan pokok lainnya.

Isu penjelajahan sejauh kejadian nyata di Kelurahan Bandar Selamat Medan, khususnya kondisi keuangan yang melemah, membuat banyak orang mengalami

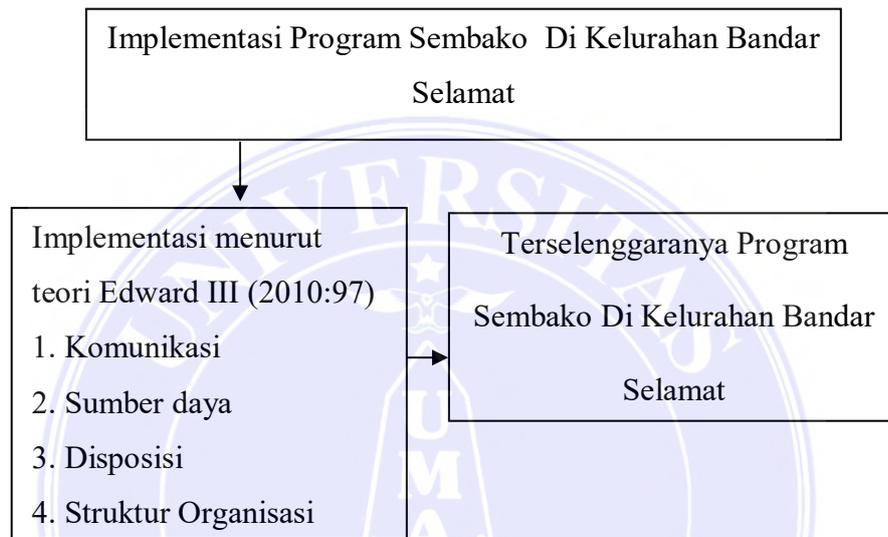
penurunan kepuasan pribadi, kehilangan pekerjaan sehingga menyulitkan individu kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Oleh karena itu, pemerintah memberikan strategi untuk membantu meringankan kebutuhan pangan, khususnya bagi masyarakat dengan ekonomi rendah dengan melakukan pendekatan program sembako untuk sedikit mengurangi beban daerah dalam memenuhi kebutuhan pokok. Peneliti mengangkat beberapa indikator seperti yang ditunjukkan oleh Edward III, khususnya:

1. Komunikasi. Dalam indikator komunikasi ini akan terlihat bagaimana jalannya pelaksana menyampaikan data terkait strategi program Sembako, dengan tujuan agar diketahui cara paling umum dalam melaksanakan program sembako di Kelurahan Bandar Selamat Medan.
2. Sumberdaya, dalam indikator ini cenderung dipersepsikan bagaimana perangkat kelurahan sebagai pelaksana kebijakan dalam menjalankan program dan bagaimana kekuatan dan kewenangan digerakkan oleh perangkat dalam pendekatan program sembako di Kelurahan Bandar Selamat Medan.
3. Sikap, dalam indikator ini akan diketahui bagaimana mentalitas perangkat dalam melaksanakan pendekatan program sembako dan untuk mengetahui bagaimana pembagian tugas selama waktu yang digunakan untuk melaksanakan program sembako di Kelurahan Bandar Selamat Medan.

4. Struktur Birokrasi, dalam indikator ini akan diketahui bagaimana kerjasama pelaksana strategi telah disesuaikan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Kelurahan Bandar Selamat Medan.

Untuk lebih mudah memahami kerangka pemikiran ini, maka penulis menyajikan gambar bagan kerangka berfikir sebagai berikut:



Gambar 2.8 Kerangka berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Teknik metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deksriptif kualitatif. Seperti yang ditunjukkan oleh Creswell (2008) mencirikan strategi penelitian kualitatif sebagai metodologi atau melihat untuk menyelidiki dan menemukan kekhasan fokus. Untuk memahami kekhasan fokus, peneliti melakukan wawancara analisis berbicara dengan anggota atau dengan mengajukan pertanyaan umum dan agak luas. Data kemudian dikumpulkan sebagai kata-kata atau teks. Berbagai macam data kemudian dianalisis. Dari hasil pemeriksaan, peneliti kemudian, pada saat itu menggambarkannya dengan penelitian dari berbagai peneliti yang sudah dilakukan. Hasil akhir dari penelitian kualitatif dinyatakan sebagai bentuk laporan yang tertulis.

Penelitian ini diarahkan menggunakan metode deskriptif dengan metodologi pendekatan kualitatif. Creswell (2016:19) berpendapat bahwa penelitian kualitatif ini adalah teknik untuk menyelidiki dan memahami implikasi bahwa berbagai orang dan kelompok menghargai masalah sosial atau kemanusiaan. Proses eksplorasi metode kualitatif ini mencakup upaya-upaya yang signifikan, misalnya, mendapatkan klarifikasi tentang isu-isu mendesak dan metodologi untuk mengumpulkan informasi spesifik, menyelidiki informasi secara induktif dari topik eksplisit ke topik umum, dan menguraikan makna data.

3.2 Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan, peneliti melakukan penelitian di Kelurahan Bandar Selamat Medan.

3.3 Waktu Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti mencantumkan jadwal penelitian sesuai dengan yang tertera pada tabel.

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept
		2021	2021	2021	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
1	Penyusunan proposal												
2	Seminar proposal												
3	Perbaikan proposal												
4	Pengambilan data penelitian												
5	Penyusunan Skripsi												
6	Seminar hasil												
7	Perbaikan skripsi												
8	Sidang Meja Hijau												

Sumber: Dikelola Oleh Penulis Tahun 2022

3.4 Informan Penelitian

Penelitian kualitatif tidak diharapkan untuk membuat spekulasi dari hasil penelitian. Subyek penelitian yang telah difokuskan di pusat eksplorasi tidak diselesaikan dengan sengaja. Subyek penelitian menjadi narasumber informan yang akan memberikan berbagai data yang dibutuhkan selama proses penelitian.

Menurut Hendarsono dalam Suyanto (2005:171-172), informan penelitian ini meliputi tiga macam, yaitu:

- a. Informan kunci, khususnya orang-orang yang mengetahui dan memiliki data fundamental yang berbeda yang diperlukan dalam penelitian. Maka dalam penelitian kali ini, yang menjadi informan kuncinya adalah Lurah Bandar Selamat, Bpk. Muktar Lubis, S.E selaku pengelola program sembako.
- b. Informan utama, khususnya orang-orang yang langsung terlibat dengan interaksi sosial yang dimaksud. Maka pada penelitian kali ini, informan utama adalah staf dari Kantor Kelurahan Bandar Selamat, Ibu Julita Siregar, S.E. sekretaris kelurahan Bandar Selamat Medan selaku pelaksana program bantuan sembako. Selanjutnya ibu Nony Kusumawati, SRG, staf Kelurahan sebagai bagian yang menangani dalam membantu pembagian sembako dan dibantu oleh para kepala lingkungan kelurahan.
- c. Informan tambahan, lebih tepatnya orang-orang yang dapat memberikan data meskipun mereka tidak secara langsung terlibat dalam proses pembagian. Maka dalam tinjauan kali ini, yang menjadi informan tambahan adalah warga kelurahan Bandar Selamat sebagai penerima bantuan program bantuan sembako yaitu Ibu Srii dan Ibu Hanum.

3.5 Pengumpulan Data

Seorang peneliti pasti membutuhkan data untuk diteliti, mengharapkan informasi untuk dieksplorasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Sesuai Angrosino (2007), persepsi adalah Tindakan mengamati hubungan dan koneksi individu dalam pengaturan lapangan. Sementara itu, menurut Guba dan Lincoln (1981: 191-193) mengatakan bahwa: jika informasi yang diperoleh tidak meyakinkan, ilmuwan sebagian besar perlu menanyakan subjeknya, tetapi karena ia perlu memperoleh kepastian tentang keabsahan informasi, pendekatan terbaik adalah dengan memperhatikan peristiwa asli itu sendiri. Dalam situasi tertentu di mana prosedur komunikasi lainnya tidak dimungkinkan, pengamatani dapat menjadi perangkat yang sangat berharga.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara paling umum untuk memandu diskusi untuk dapat mengumpulkan data (Angrosino, 2007). Fase terpenting dalam mengarahkan pertemuan etnografi adalah memilih saksi. Salah satu Langkah awal dari investigasi harus mengandung konsekuensi dari pertemuan dengan sumber informasi. dengan Pertemuan diskusi yang diarahkan oleh pertemuan informan dengan peneliti, lebih tepatnya penanya yang mengklarifikasi beberapa masalah dengan orang yang diwawancarai (dibicarakan).

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono, dokumentasi merupakan berbentuk tulisan atau karya melalui komposisi, gambar, atau dibuat oleh seseorang sebelumnya. Selain itu, peneliti juga menggunakan catatan lapangan dalam berbagai informasi. Menurut Sugiyono (2005:83) studi dokumen rekaman merupakan pelengkap metode observasi untuk pemanfaatan teknik wawancara dalam proses penelitian. Bahkan validitas hasil pemeriksaan dokumen akan lebih tinggi dengan asumsi termasuk/melibatkan konsentrat arsip dalam metode kualitatifnya.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data Informasi, penyelidikan analisis informasi menurut Sugiyono (2018: 482) adalah proses interaksi untuk dapat melihat dan menggabungkan, informasi yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan mengkoordinasikan daya ke dalam pola, memilih mana yang signifikan dan dariyang diteliti. terlebih lagi, analisis data sehingga mereka dapat dengan mudah dapat dipahamioleh diri sendiri dan orang lain. Dalam penelitian kualitatif, pemeriksaan informasi harus tetap berhubungan erat dengan pengumpulan kenyataan di lapangan, penyelidikan informasi dapat dilakukan sepanjang proses penelitian yang melibatkan prosedur penyelidikan informasi sebagai berikut:

1. Reduksi Informasi (Reduksi Data)

Penurunan informasi adalah jalan memilih, memusatkan perhatian pada peningkatan, mengabstraksi dan mengubah informasi kasar yang muncul dari

akun pengaturan di lapangan, siklus ini terjadi terus-menerus. Pengurangan informasi meliputi: meringkas informasi, coding, mengikuti mata pelajaran, membuat kelompok (Patilima, 2005:107). Motivasi yang melatarbelakangi penelitian ini adalah untuk memutuskan pelaksanaan penataan dalam pembinaan item. Jadi spesialis akan menangani data yang diperoleh dari saksi yang berbeda, baik itu otoritas publik atau daerah setempat. Dari konsekuensi penentuan data, analis akan mengelompokkan data mana yang penting dan mana yang tidak.

2. Tampilan Data (Data Display)

Menurut Sugiyono (2013:49) pengenalan informasi harus dimungkinkan sebagai penggambaran singkat, garis besar, hubungan antara klasifikasi, diagram alur dan sebagainya. Pengenalan informasi yang didapat dari lapangan terkait dengan segala permasalahan eksplorasi dipilih antara yang dibutuhkan dan yang tidak, kemudian, kemudian dirangkai dan kemudian diberikan batasan-batasan permasalahan. Spesialis mencoba memasukkan informasi terkait untuk menyampaikan data yang dapat ditutup dan memiliki kepentingan khusus. Interaksi harus dimungkinkan dengan menunjukkan dan membuat asosiasi antara kekhasan untuk menguraikan apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang harus diikuti untuk mencapai target eksplorasi.

3. Hasil Akhir/Verifikasi

Ujung-ujungnya ditarik dengan melihat kesesuaian penjelasan dari subjek penelitian dengan implikasi yang terkandung dalam ide-ide mendasar pemeriksaan. Pengecekan direncanakan agar evaluasi kesesuaian informasi dengan tujuan yang terkandung dalam gagasan pokok pemeriksaan lebih tepat dan

objektif. Pemeriksaan informasi yang dilakukan oleh spesialis diselidiki dengan menggunakan subyektif yang jelas.

Dengan membuat penentuan dari isu-isu yang dibawa oleh ilmuwan ke dalam jenis pertemuan dan dimaksudkan untuk menjadi gambaran bahwa spesialis menarik pada isu-isu yang diangkat dan mencapai kesimpulan. Ujung dasar yang diangkat masih bersifat sementara dan akan berubah jika bukti kuat ditemukan untuk membantu tahap pengumpulan informasi berikutnya. Kursus mendapatkan bukti ini dikenal sebagai pemeriksaan informasi.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Sembako di Kelurahan Bandar Selamat Medan dengan menggunakan indikator George Edward III (2010) masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik, dapat dilihat dari Komunikasi yang terjadi di lapangan berupa memberikan atau menyampaikan arahan bahkan penyampaian informasi sangat penting bagi masyarakat penerima manfaat. Komunikasi yang terjadi di lapangan berupa memberikan atau menyampaikan arahan bahkan penyampaian informasi bahkan penyampaian aturan yang diterapkan di kantor kelurahan bandar selamat Medan dalam program sembako ini kurang dipahami masyarakat. Ini terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang adanya program yang bertempat tinggal jauh dari kantor kelurahan ini terjadi para pelaksana kebijakan yang kurang dalam penyampaian informasi. Sumber daya manusia pada kelurahan bandar selamat kurang memperhatikan jumlah kepada penerima manfaat yang sudah banyak perubahan karena harus disesuaikan dengan seberapa besar bantuan yang tersedia. Sikap dari pegawai Pada Kelurahan bandar selamat masih kurang dalam menyikapi program sembako karena masih mementingkan keluarga terdekat. pegawai kelurahan dalam melayani masyarakat dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat jika ada yang memberikan pendapat maupun keluhan. Dalam struktur birokrasi pembagian kinerja lebih

teratur sehingga pada saat pelaksanaan dari kebijakan berlangsung tidak ada lagi penyimpangan yang terjadi. Maka dengan ini agar semua yang terlibat dalam proses pelaksanaan kebijakan ini lebih meningkatkan proses kinerja.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi Program Sembako Di Kelurahan Bandar Selamat Medan penulis memberikan saran diharapkan pada Kelurahan Bandar Selamat Medan aspek komunikasi agar lebih lagi menambah jadwal sosialisasi kepada masyarakat, agar masyarakat lebih memahami program sembako. Sumber daya pada agen ditambah lagi, agar pelaksana tidak kewalahan, untuk dana yang disalurkan kepada KPM disarankan agar tidak mengalami perubahan dengan begitu jumlah KPM juga tidak mengalami perubahan. Mengenai ketidak tepatan sasaran, pindah alamat atau bahkan meninggal dunia diharapkan pada Kelurahan Bandar Selamat Medan aspek komunikasi agar lebih lagi menambah jadwal sosialisasi kepada masyarakat, agar masyarakat lebih memahami program sembako. Mengenai jadwal penyalurannya itu seharusnya konsisten, agar KPM tau pasti kapan penyalurannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Angrosino.(2007).*Research Design Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Cresswell. (2018). *Research Design*.Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Creswell. (2016).*Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dunn,W.N.(2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Dye, Thomas R.(2014). *Understanding Public Policy*. 3th Englewood Cliffs,NJ; Prentice Hall.
- Edwards III,G.C.(1980).*Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.Washington
- Grindle, M.S.(2017). *Politics and policy implementation in the third world*. In
- Lincoln,Guba.(1981). *Effective Evaluation*. San Fransisco: lossey-Bass Publishers
- Minarsih.(2016). *Manajemen Produksi*. Jakarta: Badan penerbit IPWI.
- Nasution,B.J. (2016). *Kajian Filosofis tentang Hukum dan Keadilan dari Pemikiran Klasik*
- Patilima (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono(2019). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta

suyanto (2005). *Konsep dasar pendidikan anak usia dini*. Jakarta: Depdikna

Jurnal:

Coryanata, I.(2012). *Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah*

Jones,J.J. (1991). *Earnings Management During Important Relief Investigations*. *Journal of Accounting Research*,29, (2), 193-228

Jurnal Akuntansi dan Investasi, 12(2),110-125. Retrieved from <http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/678/830>

Mutiasari, Yamin, M.N, & Alam, S. (2016). *Implementasi Kebijakan Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat pada Kepolisian Resort Kota Kendari*. *Publica*, 1(1),114. Retrieved from

Parsons, D.W.(1995). *Public policy: an introduction to the theory and practice of policy analysis*. *Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis*

Ramdhani, M.A., & Suryadi, K.(2005).*Consensus Method Development on Analytic Hierarchy Process*. *International Conference on Quantitative Sciences and Its Applications* (pp.1-10). Penang: Universitas Utara Malaysia

Rohman, A.T.(2016). *Implementasi Kebijakan melalui Kualitas Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah dan Implikasinya terhadap Kepuasan Masyarakat di Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan*. Bandung: Universitas Pasundan. Retrieved from

Al-Ihkam,11(2),2956.Retrievedfrom

Wahyudi. 2016. *Perbandingan struktur anatomi, sifat fisis dan sifat mekanis kayu jati unggul dan kayu jati konvensional*. *Jurnal Ilmu dan Teknologi Kayu Tropis*. 3(2): 53-59.

Undang-Undang:

Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako Tahun 2021 Nomor 950

Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program sembako oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini 19 Agustus 2021 yang menjadi acuan terlaksananya program.

Peraturan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

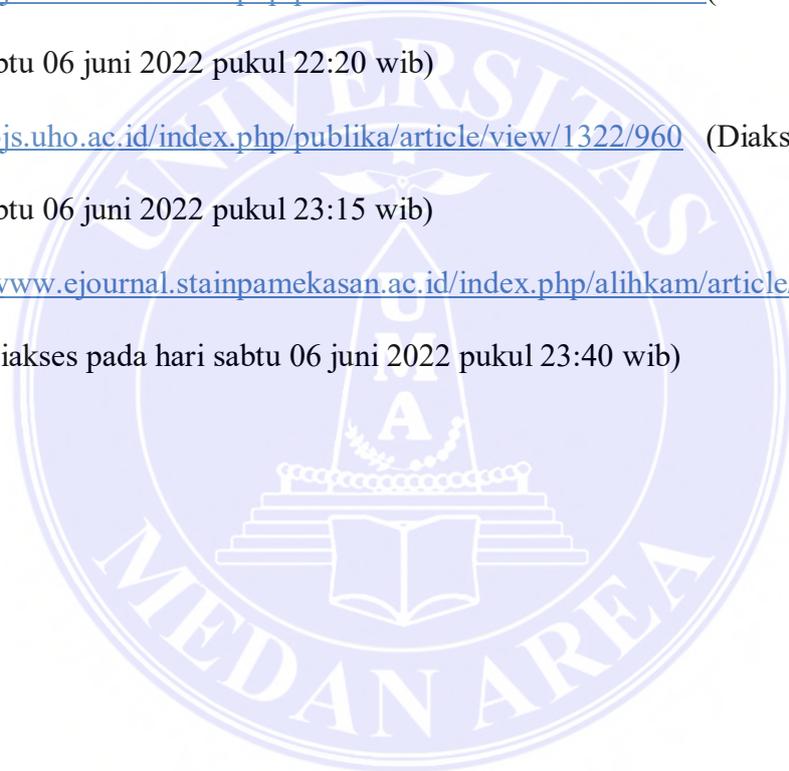
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai.

INTERNET:

<http://ojs.uho.ac.id/index.php/publika/article/view/1322/960> (Diakses pada hari sabtu 06 juni 2022 pukul 22:20 wib)

<http://ojs.uho.ac.id/index.php/publika/article/view/1322/960> (Diakses pada hari sabtu 06 juni 2022 pukul 23:15 wib)

<http://www.ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/alihkam/article/view/93>
(Diakses pada hari sabtu 06 juni 2022 pukul 23:40 wib)



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Wawancara

Pertanyaan untuk informan kunci (Lurah):

Komunikasi

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan sosialisasi dari pihak kelurahan kepada masyarakat?
2. Bagaimana komunikasi dengan pihak-pihak terkait?
3. Apakah ada hambatan dalam proses sosialisasi?

Sumberdaya

1. Bagaimana kemampuan implementor/pegawai dalam pelaksanaan kebijakan?
2. Apakah ada pelatihan peningkatan kualitas SDM?
3. Seberapa besar anggaran dana yang dialokasikan untuk implementasi program sembako?

Disposisi

1. Bagaimana sikap pelaksana dalam mengimplementasikan program sembako?

2. Bagaimana pengawasan dan pengendalian program sembako?
3. Apakah terdapat hambatan yang ditemukan dalam implementasi program sembako?

Struktur birokrasi

1. Bagaimana struktur birokrasi di kelurahan bandar selamat terhadap program sembako?
2. Bagaimana pembagian tanggung jawab?
3. Bagaimana SOP dari kebijakan program ini?

Pertanyaan untuk informan utama (pegawai)

1. Siapa saja yang terlibat dalam proses sosialisasi?
2. Apakah ada aplikasi dalam melihat informasi terkait program sembako/BPNT di media sosial?
3. Apakah ada hambatan dari proses sosialisasi?

Sumber daya

1. Dari mana sumber anggaran program sembako?
2. Apakah anggaran tersebut sudah mencukupi?
3. Seberapa besar dana yang dialokasikan?

Disposisi

1. Apakah pemerintah mendukung terhadap adanya program sembako ini?
2. Bagaimana pengendalian dan pengawasan program?
3. Apakah terdapat hambatan yang ditemukan dalam program?

Struktur birokrasi

1. Bagaimana struktur birokrasi dalam kebijakan?
2. Bagaimana pembagian tugas dan tanggung jawab?
3. Bagaimana pengambilan keputusan terkait program ini?

Pertanyaan untuk informan tambahan (masyarakat):

Komunikasi

1. Apakah ada sosialisasi dari pegawai kelurahan?
2. Bagaimana sosialisasi tersebut? Apakah mudah dipahami?
3. Apakah ada keluhan bapak/ibu dalam proses untuk mendapatkan bantuan?
4. Apa tanggapan bapak/ibu terhadap program sembako?

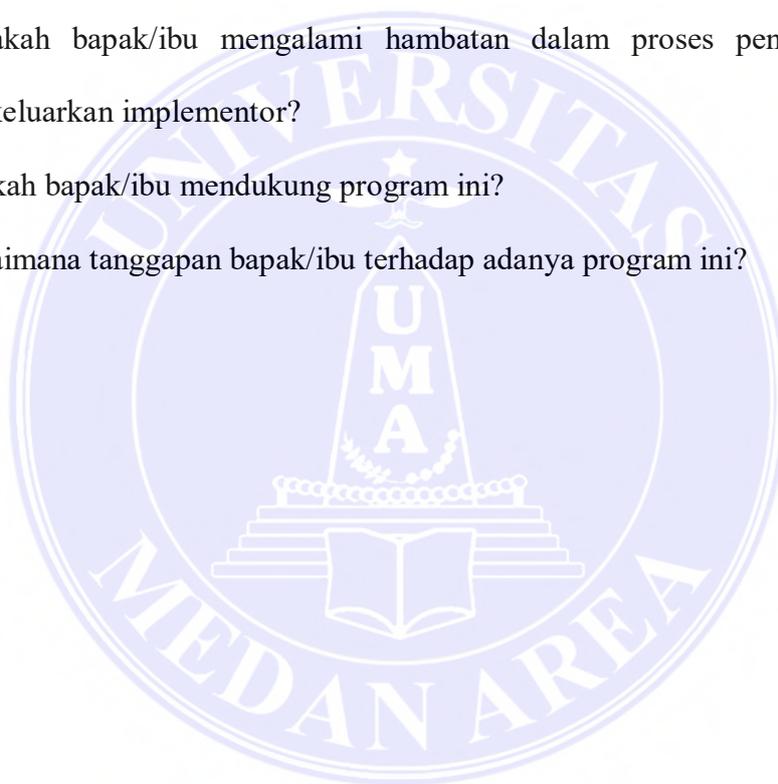
Sumber daya

1. Bagaimana kualitas pelayanan dalam program sembako dalam melayani bapak/ibu?
2. Apakah ada biaya yang dikeluarkan bapak/ibu dalam mengurus administrasi pengambilan bantuan?

3. Bagaimana dengan sarana prasarana dalam proses pengurusan program sembako ini?

Disposisi

1. Bagaimana respon bapak/ibu mengenai program sembako ini?
2. Apakah bapak/ibu mengalami hambatan dalam proses pengurusan yang dikeluarkan implementor?
3. Apakah bapak/ibu mendukung program ini?
4. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap adanya program ini?



Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian



Kantor kelurahan bandar selamat Medan (12 April 2022)



Dokumentasi wawancara dengan informan kunci pak lurah kelurahan bandar selamat (13 April 2022 pukul 09:30 wib)



Dokumentasi wawancara dengan informan utama sekretaris lurah kelurahan bandar selamat (13 april 2022 pukul 09:30 wib)



Dokumentasi wawancara dengan informan utama pegawai kantor kelurahan bandar selamat (13 April 2022 pukul 09:30)



Dokumentasi wawancara dengan informan tambahan masyarakat kelurahan bandar selamat (13 April 2022 pukul 10:20)



Dokumentasi wawancara dengan informan tambahan masyarakat kelurahan bandar selamat (13 April 2022 pukul 10:20)

Lampiran 3. Surat Selesai Penelitian

**PEMERINTAH KOTA MEDAN**
KECAMATAN MEDAN TEMBUNG
KELURAHAN BANDARSELAMAT
Jalan Kapten M. Jamil Lubis No.54 Medan Kode Pos 20223

Medan, 13 April 2022

Nomor : 070/22
Lampiran : -
Ikhwal : **SELESAI PENELITIAN**

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ilmu Sospol
Universitas Medan Area
Di - Medan

Dengan Hormat.

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Nomor : 146/FIS 2/01.10/II/2022, Tanggal 04 Februari 2022, Ikhwal : Pengambilan Data/Riset Melakukan Penelitian di Lingkungan Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung, telah selesai dilaksanakan Penelitian di Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung sejak Tgl 13 April 2022 yang mana nama Mahasiswa sebagai berikut sebagai berikut :

- Nama : HANDY POLARISMA HASIBUAN
- N P M : 188520143
- Program Studi : Administrasi Publik

Demikian Surat selesai penelitian ini disampaikan untuk urusan selanjutnya.


LURAH BANDAR SELAMAT
KECAMATAN MEDAN TEMBUNG
MUKTAR SE
PENTAK I
NIP. 19641231 198511 1 003

Tembusan :

1. Camat Medan Tembung.
2. Pertinggal.



Lampiran 4. Hasil Turnitin

turnitin Similarity Report ID: oid:29477:20626206

PAPER NAME	AUTHOR
188520143-Handy Polarisma Hasibuan-I mplementasi Program Sembako Di Kelurahan Bandar Selamat Medan.do	Handy Handy Polarisma

WORD COUNT	CHARACTER COUNT
10249 Words	69294 Characters

PAGE COUNT	FILE SIZE
51 Pages	154.1KB

SUBMISSION DATE	REPORT DATE
Aug 11, 2022 10:55 PM GMT+7	Aug 11, 2022 10:57 PM GMT+7

● **21% Overall Similarity**
The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 21% Internet database
- 0% Publications database

● **Excluded from Similarity Report**

- Crossref database
- Submitted Works database
- Quoted material
- Small Matches (Less than 10 words)
- Crossref Posted Content database
- Bibliographic material
- Cited material

Summary